

## DIPLOMASI VAKSIN INDONESIA UNTUK KESEHATAN DUNIA

Humphrey Wangke

### Abstrak

*Dunia terus dibayangi dengan meluasnya penularan COVID-19 dan meningkatnya jumlah kasus maupun korban. Untuk menjawab tantangan ini sejumlah negara menerapkan program vaksinasi dan pada saat yang sama menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Pada saat kolaborasi internasional dibutuhkan untuk kesehatan global (global health), yang terjadi justru negara-negara besar lebih mengedepankan kepentingannya, tata kelola internasional tidak berfungsi dan negara-negara berkembang mencari jalannya sendiri. Tulisan ini secara ringkas membahas diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang mengancam kesehatan global. Sebagai bagian dari negara berkembang, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB telah mengingatkan pentingnya kerja sama internasional dan kesetaraan akses bagi semua negara untuk mendapatkan vaksin. Indonesia dan kelompok Global Health and Foreign Policy Initiative (GHFPI) telah mensponsori berbagai resolusi yang berkaitan dengan kesehatan global, namun negara-negara maju lebih memikirkan kepentingannya. Pada akhirnya Indonesia harus berinisiatif melakukan diplomasi ke berbagai negara untuk mendapatkan vaksin guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.*

### Pendahuluan

Arah kebijakan luar negeri sebuah negara harus sesuai dengan kepentingan nasionalnya agar mendukung upaya mencapai tujuan bersama. Pada tanggal 7 Januari 2021, di depan pers, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyebutkan ada 5 prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2021. Kelima prioritas tersebut adalah membangun kemandirian

dan ketahanan kesehatan nasional, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan, memperkuat sistem perlindungan WNI, berkontribusi memajukan berbagai isu kawasan dan dunia, serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah RI. Prioritas seperti itu tentunya tidak muncul begitu saja, tetapi berasal dari tantangan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2020.



Berdasarkan kelima prioritas tersebut, perhatian khusus perlu diberikan pada prioritas pertama, yaitu membangun kemandirian bangsa dan kesehatan nasional karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang telah memberikan pukulan hebat terhadap negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 telah merusak kesehatan dunia dan menimbulkan dampak luar biasa pada perekonomian nasional negara-negara di seluruh dunia, seperti pertumbuhan ekonomi minus, pengangguran meningkat, dan jumlah orang miskin bertambah.

Menghadapi kondisi buruk seperti itu, negara-negara di dunia berlomba-lomba menemukan vaksin yang dapat memutus mata rantai pandemi COVID-19. Ditemukannya vaksin di berbagai negara seperti di AS, Inggris, dan China telah memberikan semangat baru terhadap pulihnya roda perekonomian dunia. Namun, sebagaimana disinyalir Menlu Retno LP Marsudi, hal tersebut masih menimbulkan masalah karena kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara masih menjadi persoalan. Presiden Joko Widodo ketika berpidato di depan Majelis Umum PBB pada bulan September 2020 telah mengingatkan tentang pentingnya akses terhadap vaksin jika pandemi COVID-19 ingin diakhiri.

Sejak muncul laporan pertama kali tentang penyakit ini di Wuhan, China, 31 Desember 2019 sampai tanggal 7 Januari 2021, telah lebih dari 86 juta kasus di seluruh dunia dengan jumlah korban meninggal mencapai 1,8 juta orang (Kompas, 5 Januari 2021). Di Indonesia, hingga

20 Januari 2021, jumlah kasus telah mencapai 939.948 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana COVID-19 pada 2 Maret 2020, dengan lebih dari 26.000 orang meninggal (Kompas.com., 20 Januari 2021). Jumlah kasus maupun korban diperkirakan akan meningkat ketika diberitakan ditemukan varian baru SARS-CoV-2 yang lebih cepat penyebarannya. Peningkatan ini mendorong Indonesia menutup pintu bagi warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia antara tanggal 1-14 Januari 2021. Langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Azis Samsudin karena akan memutus rantai penyebaran varian baru COVID-19. Artikel ini menganalisis secara ringkas, diplomasi seperti apa yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang mengancam kesehatan global?

### **Kesehatan Global dan Nasionalisme Negara**

Kesehatan global (*global health*) sedikitnya dicirikan oleh 3 isu utama, yaitu *pertama*, pandemi karena melampaui batas negara; *kedua*, perlu kerja sama global untuk menanggulangnya; *ketiga*, berkeadilan, yaitu setiap negara memiliki akses yang sama terhadap kesehatan, khususnya obat-obatan. Pada awalnya, kesehatan global dianggap sebagai domain kebijakan nasional mengingat negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, ketika dunia memasuki era di mana interkoneksi antar-sektor dan antar-aktor semakin meningkat maka kesehatan berkembang pula sebagai fokus kerja sama internasional.

Penyakit-penyakit baru yang ditimbulkan oleh virus-virus influenza dengan *strain* baru, atau penyakit-penyakit lama yang muncul kembali, telah membawa dampak yang lebih signifikan saat ini, mengingat jumlah populasi penduduk yang lebih banyak dan padat serta perpindahannya lebih cepat dan masif. Ketika penyakit-penyakit tersebut menimbulkan wabah (*outbreak*), masyarakat internasional harus siap merespons dengan pengendalian, diseminasi, dan distribusi obat/vaksin yang merata dan dapat diakses.

Sejak beberapa dekade, globalisasi telah meningkatkan intensitas interaksi dan pertukaran penduduk antar-negara. Pergerakan orang yang cepat dan masif memiliki implikasi bagi kondisi kesehatan masyarakat di seluruh dunia, terutama risiko tersebarnya penyakit. Risiko tersebut akan bertambah apabila perpindahan penduduk dilakukan secara tidak menentu. Para pengungsi atau pencari suaka yang meninggalkan wilayah asalnya akibat konflik, misalnya, sangat rentan terhadap masalah-masalah kesehatan seperti kelaparan dan kekurangan gizi serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Namun dahsyatnya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak setahun terakhir justru memperlihatkan bagaimana visi nasionalisme negara menjadi hambatan bagi semangat multilateralisme yang dibawa oleh badan dunia PBB maupun organisasi internasional. Sejumlah pemimpin negara telah melakukan pelemahan terhadap kewenangan Organisasi Kesehatan Dunia

(*World Health Organization/WHO*), menghalangi respons terkoordinasi PBB, dan memberlakukan kebijakan menutup diri dalam menghadapi pandemi. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS menarik diri dari WHO dan menolak memenuhi kewajiban donasi bagi lembaga kesehatan dunia tersebut. Demikian pula dengan China, setelah mendapat kritik dari WHO dan banyak negara lainnya, negara ini akhirnya mengizinkan para pakar kesehatan dunia untuk mengunjungi Wuhan dalam rangka mengetahui bagaimana virus pertama kali berpindah dari hewan ke manusia demi mencegah terjadinya pandemi yang lain.

Pelemahan terhadap lembaga internasional diikuti pula dengan keengganan banyak negara untuk memberikan informasi yang akurat kepada WHO, serta tidak bertindak sesuai rekomendasi WHO. Sejumlah negara lebih mengedepankan kepentingan nasionalnya daripada kesehatan global. Kondisi politik internasional yang dipengaruhi oleh konflik AS-China telah menjadikan respons setiap negara terhadap pandemi menjadi tidak terkoordinasi. Semangat proteksionisme atas berbagai peralatan kesehatan juga menguat seiring dengan sikap negara-negara yang menutup perbatasannya.

Terakhir, persaingan antar-negara dalam mempromosikan vaksin COVID-19 di pasar internasional justru membuat negara miskin dan berkembang harus menunggu lama untuk mendapatkannya. Karena itulah Indonesia selalu memperjuangkan vaksin sebagai barang publik global. Indonesia menghendaki agar

semua negara di dunia mempunyai akses yang sama terhadap vaksin yang aman dengan harga yang terjangkau. Kesehatan global tidak akan pulih sepenuhnya apabila masih ada negara yang belum berhasil mengalahkan COVID-19.

### Diplomasi Vaksin Indonesia

Diplomasi vaksin Indonesia ini dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan tugas utama membuka akses pasar, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul. Meskipun di dalam berbagai forum internasional Indonesia berulang kali menyebutkan tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap alat kesehatan seperti vaksin, namun pada kenyataannya Indonesia harus bermanuver memperjuangkan kepentingannya. Melalui pendekatan secara bilateral, diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia dalam kasus COVID-19 telah memberikan hasil nyata dan efektif.

Menlu Retno Marsudi telah mengunjungi banyak negara seperti China, Inggris, dan Swiss untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia. Dengan memberdayakan KBRI, Indonesia berhasil masuk dalam kelompok *Advanced Market Commitment*, yang berarti menerima akses vaksin 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO. Meskipun mempunyai prinsip “*all vaccine for same people in some countries*”, namun WHO hanya menyediakan vaksin sebatas 20 persen dari total populasi sebuah negara. Melalui pendekatan bilateral, Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Sinovac (China), Pfizer (AS), dan

AstraZeneca (Inggris). Diplomasi vaksin Indonesia secara bilateral yang utama adalah memastikan ketersediaan jatah 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO.

Di samping pendekatan bilateral, Indonesia juga melakukan pendekatan pendekatan multilateral. Pendekatan multilateral sebenarnya sudah lama dilakukan Indonesia dengan cara mengintegrasikan politik luar negeri dengan isu kesehatan global. Indonesia bekerja sama dengan Afrika Selatan, Brazil, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand membentuk *Global Health and Foreign Policy Initiative* (GHFPI) pada bulan September 2006 di New York. GHFPI inilah yang kemudian mensponsori dikeluarkannya berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan penyakit menular, yaitu: Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/108 Tahun 2009 tentang pengendalian *emerging infectious disease* dan SDM kesehatan; Resolusi No. 65/95 Tahun 2010 tentang tata kelola global dan pencapaian MDGs; Resolusi No. 66/115 Tahun 2011 mengenai kesehatan, lingkungan hidup, dan bencana alam; Resolusi No. 67/81 Tahun 2013 mengenai *Universal Health Coverage* (UHC); serta Resolusi No. 68/98 Tahun 2014 mengenai kemitraan global. Semua resolusi ini baru terlihat urgensinya pada saat sekarang ketika dunia harus berhadapan dengan pandemi COVID-19.

Dalam Sidang Umum PBB ke-75 bulan September 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengusulkan pentingnya kolaborasi dan *collective global leadership* dalam menangani pandemi. Menindaklanjuti usulan itu, pada tanggal 14 Desember 2020

Indonesia berhasil menginisiasi lahirnya sebuah resolusi Majelis Umum PBB lainnya, yaitu “*Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All*”. Melalui resolusi ini, Indonesia sangat menekankan pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan global. Resolusi ini sangat sejalan dengan posisi Indonesia sebagai Ketua GHFPI yang aktif mendukung upaya global mengatasi dampak pandemi COVID-19 sekaligus menjadi bukti nyata kiprah Indonesia dalam memperjuangkan solidaritas internasional terkait kesehatan global, khususnya pada masa pandemi COVID-19.

Saat mempresentasikan resolusi dimaksud ke negara-negara anggota PBB, Indonesia menyampaikan bahwa resolusi ini meminta negara-negara anggota PBB untuk memperkuat sistem layanan kesehatan nasional yang terjangkau, membuat kebijakan inovatif terkait pembiayaan layanan kesehatan, dan tidak diskriminatif dalam mengatasi pandemi. Resolusi juga mendorong pemerintah untuk bermitra dengan dunia usaha, LSM, dan kalangan akademik, termasuk apresiasi kepada tenaga kesehatan pada masa pandemi. Bagi Indonesia kerja sama kemitraan dengan semua *stakeholder* merupakan modal untuk bangkit bersama dari dampak pandemi COVID-19. Diplomasi semacam ini penting untuk menjaga kedaulatan dan menggerakkan perekonomian dalam negeri serta menunjukkan komitmen untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

Diplomasi Indonesia bukan hanya berhenti pada pengusulan

resolusi PBB, tetapi juga aktif mengupayakan ketersediaan vaksin COVID-19 bagi semua negara dan tidak hanya dikuasai oleh negara-negara maju. Menghadapi kondisi seperti itu, DPR dapat melakukan diplomasi parlemen membantu pemerintah mendapatkan vaksin melalui berbagai forum keparlemenan internasional seperti IPU, AIPA, PUIC, APPF, dan sebagainya. Bila memang dimungkinkan, inisiasi dapat dilakukan DPR dengan membentuk wahana baru multilateral yang bersifat *ad hoc* sebagai media interaksi antar-parlemen dalam mengatasi pandemi COVID-19.

### **Penutup**

Meskipun pandemi COVID-19 telah mengancam kesehatan global, namun kerja sama internasional untuk mengatasinya belum terkoordinasi dengan baik. Setiap negara justru berlomba-lomba mengatasi pandemi dengan caranya sendiri sesuai dengan kepentingannya. Kerja sama internasional menjadi terabaikan akibat konflik AS-China yang belum berakhir. Indonesia harus berinisiatif melakukan diplomasi ke berbagai negara untuk mendapatkan vaksin yang sangat dibutuhkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

### **Referensi**

- “Australia urges China to Give acces to WHO experts”, *The Jakarta Post*, 8 Januari 2021, hal. 8.
- “China knocks on door as RI prepares vaccine rollout”, *The Jakarta Post*, 12 Januari 2021, hal. 1.
- “Globalizing the COVID-19 Vaccine”, *The Jakarta Post*, 6 Januari 2021 hal. 7.

- "Kasus Naik Vaksin di Kebut", *Kompas*, 5 Januari 2021, hal. 4.
- "Kemitraan untuk Bangkit Bersama", *Kompas*, 8 Januari 2021, hal. 4.
- "Lockdowns return as nations fight resurgent virus", *The Jakarta Post*, 6 Januari 2021, hal. 1.
- Marsudi, Retno LP. "Diplomasi Vaksin di Tengah Pandemi", *Kompas*, 7 Januari 2021, hal. 6.
- "Politik Luar Negeri RI Sesuai Tantangan", *Kompas*, 7 Januari 2021, hal. 1.
- Ramadhan, Aditya. "Membangun Kembali Tata Kelola Kesehatan Global", *Kompas*, 24 Desember 2020, hal. 4.
- "RI shuts borders as new COVID-19 starin spreads", *The Jakarta Post*, 29 Desember 2020, hal. 1.
- "Tim WHO Kaji Asal Korona", *Kompas*, 6 Januari 2021, hal. 5.
- "Tiongkok Blokade Tim WHO", *Media Indonesia*, 7 Januari 2021, hal. 8.
- "UPDATE: Bertambah 12.568, Total Kasus Covid-19 Indonesia 939.948 orang", *kompas.com.*, 20 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/update-bertambah-12568-total-kasus-covid-19-indonesia-939948-orang>, diakses 20 Januari 2021.
- Wirengjurit, Dian, "COVID-19 dan Pertarungan Kekuatan Global", *Kompas*, 4 Januari 2021, hal. 7.



Humphrey Wangke  
[humphrey.wangke@dpr.go.id](mailto:humphrey.wangke@dpr.go.id)

Dr. Humphrey Wangke, M.Si. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Kepakaran Isu-Isu politik Strategis Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa Karya tulis yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Diplomasi Indonesia dan Pembengunan Konektivitas Maritim (2018)", "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan (2017)", "Solving the Problem of Illegal Logging hrough the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, East Kalimantan (2017)", "The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership (2017)".

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.